

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS :
RENOVASI PASAR DESA PAKIS BARU KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN)**

Oleh : NOVYAN SUBEKTI dan SYAIFUL MAHFUD ABDULLOH

**Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo**

Jl. Budi Utomo No.10 Ronowijayan, kec Siman, Ponorogo 63471 Jawa Timur

Telp (0352) 481124, 487662, fax (0352) 461769

Email: soebexti244@gmail.com & syaifulaif97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah desa tentang penataan pasar tradisional serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pakis Baru, dan para pedagang dan masyarakat disekitar pasar Desa Pakis baru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaksi menurut Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari (1) tidak adanya perdes sebagai pedoman dalam mengelola pasar, serta ketidaktahuan dan ketidakikutsertaan para pengelola pasar terkait kegiatan renovasi pasar Desa Pakis Baru. (2) Tidak adanya perpaduan sumber-sumber yang diperlukandari produsen kepada konsumen, (3) kompleksnya hubungan kausalitas yang terjadi, (4) pelaksanaan dari kebijakan yang tidak sesuai dengan konsep awal, (5) tidak adanya pemahaman terhadap tujuan, komunikasi, koordinasi, penempatan tugas-tugas dengan benar, (6) penyalahgunaan wewenangpasar seperti tempat parkir. Kendalanya yaitu (1) tidak adanya transparansi yang jelas baik itu masalah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun bentuk dan ukuran bangunan yang jelas kepada para pedagang. (2) Kurangnya SDM pihak terkait Kabupaten Pacitan dalam proses pengawasan. (3) Tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa Pakis Baru dengan Bapermas kabupaten Pacitan. (4) tanah lahan pasar masih bersengketa dengan milik perseorangan.

Kata kunci : *kebijakan pemerintah desa tentang pasar desa*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang kebanyakan masyarakatnya memiliki status sosial menengah kebawah dalam artian masih banyak masyarakat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Pasar tradisional dalam hal ini sangat membantu masyarakat yang memiliki status sosial menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di Desa Pakis Baru ada beberapa toko swalayan dan toko kelontong yang sangat diminati oleh masyarakat . Walaupun hanya ada beberapa pasar/toko yang berbaur modern yang ada di Desa Pakis Baru tapi sangatlah mampu menyedot antusias masyarakat sekitar untuk mengunjungi tempat tersebut dan berbelanja di sana. Mayoritas masyarakat desa penghasilannya berasal dari bercocok tanam. Sistem barter juga masih sering di jumpai di pasar tradisional khususnya pasar Desa Pakis Baru. Tidak sedikit masyarakat sekitar menukarkan hasil buminya untuk ditukar dengan kebutuhan pokok sehari-harinya. Mayoritas masyarakat sekitar adalah petani cabai, biasanya cabai di jual ke pasar dan di barterkan dengan kebutuhan primer seperti beras, gula, minyak, serta kebutuhan dapur lainnya. Sedangkan di pasar modern, masyarakat desa tidak bisa menggunakan sistem tersebut. Akan tetapi keberadaan pasar tradisional yang ada di desa tersebut sangatlah memperhatikan. Keadaan pasar yang kotor, kurang nyaman, dan tidak adanya fasilitas yang memadai seperti tempat parkir. Dan jika musim penghujan tiba pasar ini tidak jarang lumpuh/berhenti beroperasi karena kondisi pasar yang becek serta sering terjadi kecelakaan antara

pengguna pasar maupun pengaktifitas pasar disebabkan lahan parkir yang tidak ada serta penjual yang berjualan di trotoar yang disebabkan kurangnya lahan untuk berjualan membuat para pedagang dan pengunjung pasar tidak betah berlama-lama di pasar tradisional khususnya pasar desa Pakis Baru ini. Hal ini menyebabkan para pengunjung beralih berbelanja di toko/ruko kelontong yang lebih nyaman, bersih, dan memiliki berbagai fasilitas yang lebih baik di banding yang ada di pasar tradisional. Sengketa tanah lahan pasar yang di miliki perseorangan Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah desa (Pemdes) desa Pakis Baru belum membuat Peraturan tentang pasar tersebut. Belum juga ada peraturan penataan ruang Tentang Pasar Tradisional yang ada di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ini. Peraturan Desa tersebut belum dibuat sebagai wujud pelaksanaan dari otonomi daerah sebab masih adanya sengketa lahan terhadap pemilik tanah yang ada. Seperti apa yang sedang terjadi di Pasar Desa Pakis Baru yang Implementasi Kebijakan. dulunya pasar itu berdiri hanya menggunakan bambu sebagai tiangnya sekarang di renovasi menjadi tiang-tiang besi yang lebih kokoh dan lebih baik. Tapi dalam proses renovasi tersebut banyak sekali masalah yang berbenturan baik itu antar para pemilik lahan maupun antara Pemerintah Desa pakis baru dengan para pedagang. Menurut Thomas Dye (1981) (dalam Subarsono, 2013:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do”. Kemudian Dye (2001) mendefinisikannya kembali sebagai “what government do, why they do it, and what

difference it makes” (Riant Nugroho, 2014:126). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik setelah penetapan kebijakan ditetapkan. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun(dalam Riant Nugroho, 2014:668-670)untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, antara lain:Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Didasari hubungan kausal yang andal. Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi. Hubungan saling ketergantungan kecil. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Desa pakis baru, rumah kepala dusun dan pasar, bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Implementasi Kebijakan Penataan .Subyek Penelitian Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub.bagian Kekayaan Desabagian Pemerintah Desa Pengelola Pasar Desa pakis baru, Pengumpul Uang Perbaikan pasar Desa pakis baru,

Masyarakat dan Pedagang Pasar Desa pakis baru. Instrumen penelitian Dalam penelitian ini, intrumen penelitian adalah peneliti. Sumber Data 1. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat percetakan karcis pasar, foto catatan pasar Desa pakis baru , Ikhtisar pendapatan dan pengeluaran uang pasar desa, foto-foto kegiatan renovasi Pasar Desa pakis baru, foto wawancara dengan narasumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Kondisi eksternal yang dihadapi pemerintah desa adalah pihak Bapermas. Tapi kepala desa tidak pernah meminta dana kepada Bapermas. Jangankan meminta dana, melaporkan hasil keuangan pasar Desa pun tidak pernah dilakukan oleh Kepala Desa pakis baru. b. Untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Padapelaksanaannya,renovasi pasarDesa pakis baru anti dakmemilikisumberdaya yang cukupbaikdarisegifinansial, waktu, dansumberdayamanusia. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benarbenar ada. Dalam hal renovasi pasar Desa pakis baru, perpaduan berbagai sumber baik sumberdaya manusia, sumber daya finansial, sumber daya waktu maupun sumber aktor belum berjalan dengan baik. d. Berdasarkan hubungan kausal yang handal. Sebenarnya kebijakan untuk merenovasi pasar Desa

pakis baru sudah tepat karena akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasar Desa pakis baru. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan. e. Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi. Pada hubungan sebab akibat yang terjadi pada renovasi pasar Desa pakis baru sangat tinggi. Ini bisa terlihat dengan jelas bahwa Kepala Desa sangat tergantung Implementasi Kebijakan Penataan pada para pedagang yang ada di dalam pasar. f. Hubungan saling ketergantungan kecil. Hubungan saling ketergantungan pada renovasi pasar pakis baru adalah hubungan saling ketergantungan yang besar. Biaya kegiatan renovasi pasar Desa pakis baru sepenuhnya dibebankan kepada para pedagang dan pemerintah desa. h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas-tugas kegiatan renovasi pasar Desa pakis baru belum dirinci dengan benar karena pengelola pasar tidak dilibatkan sama sekali dalam perencanaan sampai pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordinasi dari kegiatan renovasi pasar Desa pakis baru belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan pengelola pasar Desa pakis baru terkait kegiatan renovasi pasar Desa pakis baru.

2. Kendala-kendala dalam proses Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional (Studi Kasus : Renovasi Pasar Desa pakis baru Kecamatan nawangan Kabupaten pacitan) a. tidak adanya transparansi yang jelas baik itu masalah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun bentuk dan ukuran bangunan yang jelas kepada para pedagang. Ini dibuktikan

dengan adanya kenaikan biaya perbaikan yang dikenakan ditengah perbaikan yang sedang berlangsung. Kenaikannya berkisar antara Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000 sedangkan tidak dijelaskan biaya tersebut untuk apa. Selain itu, bentuk dan ukuran bangunan tidak sama antara los yang satu dengan los yang lainnya. b. Kurangnya SDM pihak Inspektorat desa dalam proses pengawasan. Pihak Inspektorat desa terhalang dengan SDM yang sedikit yaitu kurang dari 15 pegawai. Dengan jumlah pegawai sedikit itu menghalangi pihak inspektorat untuk selalu mengawasi pembangunan pasar tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional (studi kasus: renovasi pasar Desa pakis baru Kecamatan nawangan Kabupaten pacitan) belum dapat berjalan dengan optimal, karena tidak adanya perdes sebagai pedoman dalam mengelola pasar, serta ketidaktahuan dan ketidakikutsertaan para pengelola pasar terkait kegiatan renovasi pasar Desa pakis baru. Dalam prosesnya, implementasi kebijakan penataan pasar tradisional (studi kasus: renovasi pasar Desa pakis baru Kecamatan nawangan Kabupaten pacitan) dipaparkan menggunakan model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, yaitu Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, berdasarkan hubungan kausal yang andal, banyaknya hubungan kausalitas yang

terjadi, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugastugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kendalanya yaitu Tidak adanya transparansi yang jelas baik itu Implementasi Kebijakan Penataan pasar tradisional di desa pakis baru. 11 masalah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun bentuk dan ukuran bangunan yang jelas kepada para pedagang, kurangnya sinkronisasi pemerintah desa dan pemilik lahan pasar, tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa pakis baru dengan pedagang.

Saran :

1. Seharusnya para perangkat desa menyelesaikan masalah lahan pasar.
2. pemerintah desa membuat kebijakan serta peraturan pasar tersebut.
3. Pemerintah Desa pakis baru harus lebih aktif bekerja sama dengan pengelola pasar.
3. Harus ada fasilitas lahan parkir dan lahan dagang yang memadahi.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono. 2013.

Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Budi Winarno. 2012.

Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS

Miles, A. Michael Huberman. 2014.

Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI-Press

Lexy J. Moleong. 2013.

Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Riant Nugroho. 2014.

Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Samuelson & Nordhaus. 2003.

Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta : PT. Media Global Edukasi

Sugiyono. 2009.

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.